

## Hasil Penelitian

### KONTESTASI POLITIK SUKU BATAK TOBA: PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PALA PULU TAHUN 2023

#### *(POLITICAL CONTESTATION OF THE BATAK TOBA ETHNIC GROUP: THE 2023 VILLAGE HEAD ELECTION IN PALA PULU VILLAGE)*

*Ririn Purba*

Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jl. Gatot Subroto No.10, RT.2/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 12710  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Indonesia

Universitas Gadjah Mada  
Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 55281  
Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia  
Email: ririnpurba2@gmail.com

*Diterima: 27 Mei 2024; Direvisi: 04 Februari 2025; Disetujui: 20 Februari 2025*

### ABSTRAK

Suku Batak Toba di desa Pala Pulu menjadi fokus dalam kajian ini karena erat dengan budaya dan modal sosial di dalamnya. Broker memegang peran penting menjadi mediator antara calon pejabat dan masyarakat. Biasanya broker dianggap memiliki kepentingan materi saja, akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana hubungan broker dengan pemilu bagi suku Batak di tanah Batak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan kompleksitas hubungan broker dalam proses pemenangan saat pemilu. Penelitian Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil yang menunjukkan bahwa modal sosial masih sangat diperlukan untuk dapat meraup suara. Ikatan marga sebagai jaringan sosial, dan kepercayaan yang dipupuk sejak awal menjadi modal yang tak kalah penting dalam kontestasi pemilihan kepala desa bagi suku batak toba di desa Pala-Pulu. Sementara itu, *money politic* masih ada, namun tidak lagi menjadi hal yang penting bahkan tidak terlalu dianggap hal yang mengkhawatirkan. Kondisi ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat sudah semakin maju dan lebih baik. Praktiknya, broker masih ada dan digunakan dalam politik desa, namun kali ini, di desa Pala Pulu, broker sebagai *assembler* yaitu perakit. Broker merakit jaring-jaring broker baru untuk kontestasi politik yang lebih besar. Hal ini erat kaitannya dengan pemilu kepala daerah yang akan dilakukan di 2024.

**Kata kunci:** Pemilihan kepala desa, Batak Toba, kontestasi politik, broker politik, strategi elektoral

### ABSTRACT

*The Batak Toba ethnic group in Pala Pulu Village serves as the focal point of this study due to its deep-rooted cultural and social capital dynamics. Political brokers play a crucial role as mediators between candidates and the community. While brokers are often perceived as being driven solely by material interests, this is not always the case. Thus, how do brokers interact with electoral processes among the Batak people in their homeland? This study aims to illustrate the complexity of brokers' involvement in securing electoral victories. Using a descriptive qualitative approach, the findings indicate that Putnam's (1993) concept of social capital remains essential for garnering votes. Clan affiliations function as social networks, and trust cultivated over time serves as a significant asset in the village head election contestation among the Batak Toba people in Pala Pulu Village. Meanwhile, money politics still exists but is no longer a dominant or alarming factor, as public awareness and knowledge have significantly improved. In practice, brokers continue to be involved in village politics. However, in Pala Pulu Village, brokers now act as assemblers—constructing networks of new brokers for broader political contestations. This phenomenon is closely linked to the upcoming regional elections in 2024.*

**Keywords:** *village head election, the batak toba, political contestation, political broker, electoral strategy*

## PENDAHULUAN

Pemilu lima tahunan di Indonesia, membutuhkan usaha dan upaya yang maksimal bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi jabatan. Mulai dari persiapan administrasi, persiapan modal ekonomi hingga modal sosial untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pada proses ini akan selalu ada broker sebagai penghubung atas kepentingan calon pejabat dengan masyarakat. hal ini juga terjadi dalam pemilihan kepala desa yang biasanya dilakukan setiap enam tahun. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan manifestasi dari demokrasi yang dilakukan di tingkat terendah dalam suatu daerah, di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi yang berlaku di tingkat desa. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemilihan kepala desa yang diadakan secara umum merupakan bentuk konkret dan nyata dari demokrasi di tingkat lokal terendah (Surya et al. 2021). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 34 menyatakan bahwa "Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa." Pasal 38 juga menyebutkan bahwa "Calon Kepala Desa yang terpilih akan dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Walikota." Sebelum menjabat, Kepala Desa terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji yang menegaskan bahwa kepala desa ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Pada tahun 2024, UU Nomor 6 tahun 2014 mengalami perubahan terutama dengan maraknya demonstrasi menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dan tuntutan lainnya. Pada tanggal 25 April 2024, Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, masa jabatan kepala desa yang awalnya hanya 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali masa jabatan, maka kepala desa dapat menjabat hingga 16 tahun (Amaranggana dan Nugroho, 2024).

Pemilu di tanah batak tentunya sangat melekat dengan intrik budaya batak terutama hubungannya dengan marga dan prinsip dalihan natolu. Suku batak toba adalah masyarakat yang menarik garis keturunan patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak keturunan laki-laki (bapak). Marga diwariskan oleh bapak dan menjadi pengikat dalam hubungan sosial.

Dalihan natolu atau tungku nan tiga yang terdiri dari 'Somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru' (Situmorang, 2022) menjadi basis suku batak toba dalam kehidupannya dan pembagian tugas dalam acara batak.

Para broker biasanya sudah memahami basis budaya dan memahami situasi politik dan masyarakat. Jaringan dalam modal sosial yang ditawarkan oleh broker politik tentu menguntungkan calon pejabat yang hendak ikut pemilu karena jaringan ini berpengaruh terhadap tersebar luasnya visi, misi calon walaupun pada prakteknya visi dan misi bukan hal yang utama. Masyarakat batak toba sendiri kerap memilih pejabat bukan berdasarkan visi misi melainkan ikatan marga (Panjaitan dan Sardini, 2019).

Sebab ada istilah '*dang tumagon tu halak adong do na di hita*' yang maknanya adalah untuk apa memilih orang lain, masih ada kita (Panjaitan dan Sardini, 2019). Kita - dalam hal ini dapat berupa teman semarga, sesuku, sekampung halaman dan identitas lainnya yang menunjukkan kesamaan. Demokrasi di daerah masih mengarah pada politik aliran yang mana memperkuat basis primordialisme (Damanik, 2018). Broker memegang peran penting dalam menguatkan primordialisme melalui modal sosial yang dimilikinya.

Hubungan broker dengan politik sangat kompleks karena terkait dengan eksistensinya dalam dunia sosial dan ekonomi. Broker harus memiliki kecakapan, kemampuan sehingga dapat dipercayai oleh aktor politik dan masyarakat. Lantas, seperti apa Pilkades yang pernah terjadi? Apa itu broker?. Broker politik politik penting sebagai penghubung, distributor dan mobilisator (Stokes et al., 2013). Broker atau calo adalah tokoh/orang yang menengahi antara dua dunia sosial yang berbeda, biasanya pada saat perubahan sosial yang cepat (Koster and Leynseele 2018). Dalam hal ini broker menjadi perantara pejabat dan masyarakat yang tentu saja sudah sangat jelas memiliki perbedaan sosial dan ekonomi.

Namun perlu digarisbawahi bahwa broker ini bukan dari sembarang orang. Broker biasanya adalah orang yang sudah memiliki otoritas dalam sebuah komunitas (Michie, 2014). Hal ini tentunya mempermudah broker untuk dipercayai oleh masyarakat. Sehubungan dengan modal sosial yakni *trust, norm* dan *network* (Putnam, 1993), broker ini sudah menanam modal sosial jauh-jauh hari sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyebar luaskan tujuan kandidat yang didukung.

Pemilu di Indonesia sudah semakin dekat, berbagai cara dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam dunia politik untuk dapat memenangkan suara, begitu juga yang terjadi di tanah batak. Kecerdasan broker dapat diperhatikan dari cara mereka menyiratkan mediasi dan pembelaan kepentingan komunitas di ruang nasional (umum) tetapi juga dapat dijadikan landasan peluncuran politik di tingkat local hingga nasional (Bierschenk, Chauveau, dan de Sardan, 2002). Kemampuan broker dalam menarik minat masyarakat dan menggerakkan masyarakat namun ada makna terselubung untuk kepentingan pribadi. Keberhasilan dari broker bagaimanapun akan memberikan kontribusi dalam popularitas dan ketenarannya dan memberi keuntungan secara individu dan mobilitas sosial ke atas (menambah jejaring ke kelas sosial di tingkat atas) (Bräuchler 2019).

Broker secara kreatif dapat mengadaptasi, memanipulasi, dan mengembangkannya lebih jauh, termasuk kearifan dan keaslian budaya (Lindquist, 2015). Namun ternyata, broker tidak selalu seperti yang dikatakan oleh Stokes, et al. (2013). Broker juga dapat disebut sebagai *assemblers* (perakit/pengumpul). Teori *Assemblage* (kumpulan) berfokus pada bagaimana elemen yang berbeda bergabung menjadi keseluruhan jaringan yang produktif. Berkumpul adalah proses untuk 'menjalin keberpihakan', 'menyatukan' berbagai actor, Lembaga dan sumber daya yang berbeda untuk membentuk kesatuan sementara atau struktur sementara (Koster and Leynseele 2018).

Teori *assemblage* (kumpulan) ini tidak memperhatikan agensi asal aktor sosial melainkan fokus pada tindakan *assembling* (berkumpul) yang dilakukan para broker. Broker adalah titik awal analitis untuk perakitan dan pemasangan kembali praktik local dalam kaitannya dengan pendorong supra-lokal dalam kekuatan global (Koster dan Leynseele, 2018). Realitas kehidupan masyarakat dengan penggabungan kekuatan supra-lokal dalam pembangunan-pembangunan. Sementara broker tumbuh subur di lingkungan yang dinamis di mana ikatan pribadi dan kelembagaan mungkin agak renggang (Lindquist et al. 2012 dalam Koster & Leynseele, 2018). Koster dan Leynseele (2018) mengembangkan gagasan tentang broker sebagai *assemblers* (perakit), memperbesar pengumpulan agen broker sembari mempertimbangkan kumpulan yang dinamis dan kompleks di mana mereka beroperasi.

Terdapat beberapa penelitian terkait broker dan modal sosial dalam dunia politik di Indonesia, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Aspinall (2014), perilaku calo/broker

terbagi atas tiga kategori yaitu calo aktivis, yang mendukung kandidat berdasarkan komitmen politik, etnis, agama, atau lainnya; broker *clientelist*, yang menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau dengan broker yang lebih senior, dengan tujuan menerima imbalan di masa depan; dan broker oportunistis, yang mencari keuntungan material jangka pendek selama kampanye (Aspinall, 2014).

Selain itu, perilaku broker bukan hanya terjadi di dunia politik saat pemilu namun juga saat demo dalam pelanggaran HAM dan hak-hak masyarakat adat terkait neoliberalisme yang digaungkan pemerintah. Penelitian di Bali dan Maluku menunjukkan perilaku broker dalam bentuk aktivisme yang didukung oleh jejaring aktivis (modal sosial), dan sebenarnya memberikan keuntungan bagi broker. Para broker mendapatkan keuntungan karena mereka sebagai aktivis menjadi terkenal dan disegani masyarakat (Bräuchler, 2019). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas Pilkades di tanah batak. Penelitian yang dilakukan Pinem (2023) menunjukkan bahwa politik identitas masih dilakukan dalam pilkades di desa Pohan Jae, salah satu desa di Tapanuli Utara.

Identitas yang digunakan adalah klan marga. Di desa Namu Ukur, Langkat juga masih menggunakan kekuatan identitas dalam praktik politik untuk Pilkades (Rosha et al. 2023). Namun setelah melakukan penelusuran dan membaca beberapa artikel penulis hendak menjawab teori *brokers as assemblers* yang disimpulkan oleh Aspinall (2014) yang ternyata ada di desa Pala Pulu. Untuk itu, kebaruan dari studi kritis ini adalah broker dalam politik di desa yang menggunakan berbagai cara, memanfaatkan pengetahuan, dan budaya untuk menambah jaringan broker baru untuk pemilu kepala daerah di masa mendatang, khususnya di tanah batak yaitu suku batak toba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa broker masih diperlukan dalam politik desa?; dan 2) Apa yang menjadi alasan broker untuk turut dalam kontestasi pemilihan kepala desa?. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kompleksnya penggunaan kata broker dalam kontestasi politik. Terutama dengan keberadaan suku batak toba yang sebenarnya sudah memiliki modal sosial dimana mereka memiliki simpul atau jaringan dalam hubungan dan ikatan marga. Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana broker tidak selalu mementingkan materi, namun memiliki tujuan lebih luas dari itu. Hal ini akan menjawab teori yang dikeluarkan oleh Aspinall terkait *brokers as assemblers*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan *key informant*. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari studi literatur terkait broker. Pemilihan informan kunci berdasarkan pada fakta bahwa mereka adalah aktor dalam kontestasi politik sehingga dianggap mampu menjawab pertanyaan penulis. Informan kunci yang dipilih adalah pelaku broker pada pesta demokrasi pemilihan kepala desa di desa Pala Pulu yang baru saja dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023 lalu dan calon Kepala Desa yang menang. Penelitian dilakukan sejak Juni 2023 hingga Mei 2024 untuk melihat bagaimana hubungan antara kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa dengan Pemilu pada Februari 2024.

Penulis menerapkan *double anonymity* untuk menjaga privasi informan dan desa, berdasarkan etika penelitian. Agar pembaca dapat menilai pengaruh identitas peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, peneliti harus memperhitungkan identitas yang mereka pilih untuk diadopsi dalam studi penelitian tertentu, yang dikenal sebagai posisionalitas (Savin-Baden & Major, 2013). Posisionalitas biasanya diidentifikasi dengan menempatkan posisi peneliti dalam kaitannya dengan tiga bidang: topik yang diselidiki; peserta penelitian; dan desain penelitian, konteks dan proses (Holmes, 2020).

Namun, posisionalitas tidak hanya dipengaruhi oleh posisi yang dipilih oleh peneliti itu sendiri, tetapi juga oleh cara mereka diposisikan oleh orang lain (Arber, 2006). Menyadari bahwa penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang budaya yang sama dengan penulis, maka penulis juga mempertimbangkan posisinya (*positionality*) (Arber, 2006; Holmes, 2020) agar tidak menjadi bias dalam hasil penelitian. Netralitas menjadi poin penting dalam penelitian Antropologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa netralitas dalam penelitian etnografi mengharuskan peneliti harus tetap objektif dan tidak memihak dalam penelitiannya.

Netralitas adalah tidak terikat pada hal apapun kecuali untuk produksi pengetahuan sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan (Hammersley and Traianou 2012). Netralitas ini hubungannya dengan kepastian. Apakah datanya pasti dan dapat dikonfirmasi secara kualitatif, apakah analisisnya berdasarkan data dan apakah kesimpulannya berdasarkan data logis dan bernilai tinggi (Hammersley, Hammersley, dan Lecturer, 1992). Netralitas

mampu menyelamatkan peneliti dan subjek penelitiannya sendiri. Oleh karenanya, *double anonymity* yang penulis terapkan juga sudah berdasarkan standar etika untuk keselamatan penulis dan informan.

Teknik pengolahan data menggunakan penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Johnny Saldana, 2019). Data dikumpulkan dari wawancara, kemudian disajikan secara deskriptif. Pemilihan lokasi berdasarkan pada kenyataan bahwa pemilu Kepala Desa di Pala Pulu baru saja dilakukan dan data tentunya tersedia sehingga untuk pengumpulan data lebih mudah. Selain itu ditemukan kebaruan-kebaruan untuk memperluas dan menjawab hasil-hasil penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Strategi Pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa.** Strategi elektoral merupakan aspek krusial bagi kandidat maupun partai politik dalam upaya memperoleh dukungan pemilih dan memenangkan pemilu. Strategi ini dapat berbeda secara signifikan tergantung pada sistem pemilihan yang diterapkan, dinamika sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara komunikasi politik dilakukan (Bertero dan Scaduto, 2023; Yaghi dan Antwi-Boateng, 2017).

Konsep budaya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas strategi politik, terutama dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang kuat, seperti Batak Toba. Dalam falsafah *Dalihan Na Tolu*, terdapat struktur sosial yang secara tidak langsung juga mencerminkan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Struktur ini terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: *Somba Marhula-hula* - Sikap hormat terhadap pihak pemberi istri atau kelompok yang semarga dengan istri. *Manat Mardongan Tubu* - Sikap kehati-hatian dan menjaga hubungan baik dengan saudara semarga. *Elek Marboru* - Kemampuan untuk mengambil hati atau menghibur saudara perempuan yang menikah dengan pihak marga lain.

Struktur ini tidak hanya mengatur hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan distribusi kekuasaan dalam konteks politik. Dalam praktiknya, setiap individu dalam masyarakat Batak Toba dapat memiliki peran yang fleksibel dalam sistem ini. Pada satu kesempatan, seseorang mungkin bertindak sebagai pelaksana dalam sebuah acara (*boru*), tetapi pada kesempatan lain, ia bisa menjadi pihak yang dihormati (*hula-hula*). Dalam konteks politik, dinamika ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bersifat

dinamis dan tidak terpusat pada satu kelompok atau marga tertentu (Situmorang, 2022).

Pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pala Pulu yang diselenggarakan pada Juni 2023, terdapat dua kandidat yang bersaing untuk menduduki posisi sebagai Kepala Desa. Keunikan dari pemilihan ini terletak pada fakta bahwa kedua kandidat, yang masing-masing berinisial TT dan LM, berasal dari marga yang sama. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam strategi politik yang harus mereka terapkan, mengingat ikatan kekerabatan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih di dalam komunitas Batak Toba.

Berdasarkan data partisipasi pemilih, jumlah total pemilih aktif yang terdaftar dalam Pilkades ini adalah 1.360 jiwa. Namun, tingkat partisipasi menunjukkan bahwa hanya 1.026 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, dengan 6 suara dinyatakan tidak sah atau batal. Dari hasil rekapitulasi suara, kandidat LM berhasil memenangkan pemilihan dengan selisih suara sebanyak 136 suara dari lawannya, TT. Selisih ini tergolong cukup signifikan dalam konteks pemilihan kepala desa, yang umumnya berlangsung dengan persaingan ketat.

LM menjelaskan bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari strategi pendekatan yang telah ia lakukan sebelumnya kepada masyarakat. Berbagai metode digunakan dalam upaya meraih dukungan, termasuk interaksi langsung dengan warga, pemanfaatan modal sosial berbasis kekerabatan, serta penguatan kepercayaan publik terhadap visi dan misi yang ia usung. Keberhasilan LM dalam memperoleh dukungan yang lebih luas dibandingkan dengan lawannya menunjukkan bahwa faktor strategi elektoral dan pendekatan personal memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dari Pilkades di Desa Pala Pulu.

LM memilih untuk maju dalam Pilkades di desanya karena menyadari ketimpangan desanya terhadap kemajuan di desa lain. Menurutnya, desa di tempat lain yang masih di kabupaten yang sama sudah memiliki banyak kemajuan, baik dari segi ekonomi, pembangunan dan infrastruktur pertanian. Jiwanya seolah ditantang untuk menghasilkan perbedaan, dan menghasilkan sesuatu yang dapat membuat desanya Pala Pulu lebih maju dan dapat bersaing dengan desa lainnya. Hal ini berhubungan dengan kemampuan. Menyadari bahwa kandidat yang menjadi pesaingnya berasal dari kampung yang sama dan memiliki marga yang identik dengan dirinya, LM menyusun berbagai strategi pendekatan sosial guna memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam konteks politik elektoral berbasis komunitas, pendekatan interpersonal

yang efektif menjadi elemen krusial dalam membangun citra dan memperkuat legitimasi politik seorang kandidat.

Oleh karena itu, LM secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya yang memiliki nilai strategis dalam memperluas jaringan sosial serta membangun kepercayaan di kalangan masyarakat desa Pala Pulu. Strategi yang diterapkan oleh LM melibatkan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, adat, dan keagamaan yang dianggap memiliki signifikansi dalam kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, ia secara konsisten menghadiri dan berperan dalam upacara pernikahan, ritual adat bagi warga desa yang meninggal, serta berbagai kegiatan gereja yang menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas setempat. Partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memperlihatkan komitmennya terhadap nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperluas jaringan sosial serta membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Selain itu, LM juga memanfaatkan hubungan kekerabatan melalui pernikahannya dengan seorang perempuan bermarga Silalahi. Hubungan ini secara strategis memperkuat jejaring sosialnya dengan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan kekerabatan dengan istrinya. Dalam masyarakat Batak Toba, ikatan sosial berbasis marga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk struktur kekuasaan dan pengaruh. Oleh karena itu, keterlibatan aktifnya dalam berbagai kegiatan adat dan relasi sosial berbasis kekerabatan menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi politiknya.

Lebih lanjut, LM memahami bahwa kepercayaan publik merupakan aspek fundamental dalam keberhasilannya sebagai kandidat. Oleh karena itu, dalam setiap interaksi sosialnya, ia secara konsisten menampilkan sikap yang menunjukkan kredibilitas dan kelayakan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, ia menerapkan prinsip-prinsip modal sosial sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (1993), yang menekankan bahwa modal sosial terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang berfungsi sebagai mekanisme dalam membangun koordinasi serta kerja sama dalam suatu komunitas.

Modal sosial ini menjadi sumber daya politik yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memperkuat legitimasi dalam proses pemilihan kepala desa. Keberadaan modal sosial memiliki implikasi yang luas terhadap strategi elektoral kandidat dalam konteks politik lokal. Kandidat yang memiliki jaringan sosial yang kuat,

hubungan kekerabatan yang erat, serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat cenderung memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh LM dalam Pilkades di Pala Pulu bukan hanya sekadar strategi sosial, tetapi juga merupakan bentuk pemanfaatan modal sosial sebagai instrumen politik yang efektif. Dengan menanamkan nilai-nilai kepercayaan dan membangun jaringan sosial yang solid, LM berhasil memosisikan dirinya sebagai kandidat yang memiliki daya tarik elektoral yang kuat, sehingga mampu meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Terkait dengan regulasi yang berlaku, kampanye Pilkades hanya diperbolehkan dilakukan dalam rentang waktu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara. Namun, dalam upaya maksimalnya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, LM mengoptimalkan strategi kampanye dalam tiga hari utama dengan pendekatan *door-to-door*. Ia secara langsung mengunjungi rumah-rumah warga, menjalin komunikasi personal, serta memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kepala Desa.

Visi utama LM dalam pencalonannya adalah "*Terwujudnya Masyarakat Desa Pala Pulu yang Adil, Makmur, dan Sejahtera*". Untuk mencapai visi tersebut, ia merancang sejumlah misi strategis, antara lain: 1) meningkatkan persatuan, kesatuan, serta semangat gotong royong dengan tetap menjaga dan melestarikan kearifan lokal; 2) memperkuat sektor ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian, dengan memberdayakan kelompok tani serta menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat; serta misi-misi lainnya yang berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara demografis, Desa Pala Pulu didominasi oleh masyarakat Batak Toba. Dalam setiap penyelenggaraan Pilkades yang berlangsung setiap enam tahun sekali, proses politik lokal di desa ini kerap diwarnai dengan pembentukan tim-tim sukses yang memainkan peran krusial dalam strategi pemenangan kandidat. Meskipun skala politiknya masih bersifat mikro, dinamika politik desa tetap dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Batak Toba, pembentukan tim sukses sangat berkaitan erat dengan ikatan genealogis berbasis *dalihan na tolu*.

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Batak memiliki peran yang signifikan dalam membentuk modal sosial. Masyarakat Batak kerap membentuk perkumpulan marga baik di

kampung halaman maupun di perantauan sebagai bagian dari jaringan sosial mereka (Panjaitan dan Sardini, 2019). Keberadaan perkumpulan ini menjadi salah satu bentuk modal sosial yang mengikat komunitas Batak secara lebih erat. Mengacu pada konsep modal sosial (Putnam, 1993), elemen-elemen seperti *trust* (kepercayaan), *norm* (norma sosial), dan *network* (jaringan sosial) berfungsi sebagai mekanisme utama yang memperkuat solidaritas sosial dan keterhubungan antarindividu dalam suatu kelompok.

Keterlibatan ikatan marga menjadi faktor penting yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam konteks politik elektoral di tingkat desa. Para kandidat sering kali mendekati tokoh-tokoh adat atau pemuka marga guna memperoleh dukungan politik yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, peran *broker politik* menjadi semakin terlihat, di mana individu-individu tertentu berperan sebagai mediator antara kandidat dan komunitas berbasis marga. Dengan adanya perantara ini, proses negosiasi politik dalam meraih suara menjadi lebih efektif, karena kandidat dapat menjangkau pemilih melalui jalur sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun dalam struktur masyarakat Batak.

Strategi politik berbasis modal sosial dan kekerabatan berperan krusial dalam menentukan dinamika kontestasi Pilkades di Desa Pala Pulu. Kandidat yang mampu memanfaatkan jaringan sosial berbasis marga dan membangun kepercayaan yang kuat dengan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan. Kombinasi antara modal sosial, strategi elektoral yang matang, serta peran broker politik menjadi faktor fundamental dalam membentuk keberhasilan kandidat dalam arena politik lokal.

LM membentuk dan mengandalkan tim suksesnya sendiri dalam upaya memenangkan Pilkades. Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam kegiatan kampanye, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi penting mengenai dinamika sosial dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya informasi yang akurat dan terkini, LM dapat merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Strategi ini memperkuat posisinya sebagai calon yang dianggap memahami kebutuhan warga serta mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada.

Selain itu, LM juga secara aktif mendekati tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat. Hal ini didasarkan pada realitas politik di mana individu-individu yang

dihormati dan memiliki posisi strategis dalam komunitas dapat berperan sebagai penggerak opini publik dan memobilisasi suara politik (Lindquist, 2015). Dengan memperkuat modal sosialnya melalui interaksi dengan tokoh-tokoh kunci, LM mampu memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata pemilih, sehingga meningkatkan daya tarik politiknya tanpa harus mengandalkan praktik politik transaksional.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik lokal di Desa Pala Pulu. Meskipun praktik *money politics* masih ditemukan, tingkat kesadaran politik yang semakin tinggi di kalangan masyarakat membuat praktik tersebut tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pemilih. Kesadaran politik yang lebih maju, ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, telah mendorong preferensi pemilih untuk lebih berorientasi pada kapasitas, kredibilitas, dan visi kepemimpinan kandidat, dibandingkan dengan sekadar insentif materi. Dengan demikian, kemenangan LM dalam Pilkades tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi politiknya, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan sosial di mana masyarakat mulai bergerak menuju demokrasi yang lebih substansial, berbasis modal sosial dan partisipasi politik yang lebih rasional.

*“Nga malo-malo nuaeng jolma. Ba molo dilean hepeng, ba niterima, ale molo dang pas na di roha attong, unang dipillit, hepengna I ma di terima.” (Bahasa Batak, Wawancara dengan DB).*

*“Orang-orang sekarang sudah pintar-pintar. Kalau dikasih uang ya terima saja, tapi kalau tidak tepat di hati, jangan dipilih, uangnya aja diterima.” (Wawancara dengan DB)*

Pendapat yang disampaikan oleh DB juga diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di kalangan masyarakat dengan rentang usia 15 tahun hingga di atas 50 tahun berada pada kisaran lebih dari 98% (Badan Pusat Statistik 2023). Data ini mencerminkan tingginya tingkat literasi di wilayah tersebut, yang dapat berpengaruh terhadap pola partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek sosial, termasuk dalam proses demokrasi dan pemilihan kepala desa.

**Broker Sebagai Bagian dari Strategi Pemenang & Merakit Jaringan Broker Baru.** Pada konteks politik lokal, peran *broker* tidak selalu didasarkan pada motif keuntungan

finansial langsung. Sebaliknya, keterlibatan mereka dalam proses pemenangan kandidat dapat didorong oleh kepentingan strategis jangka panjang, seperti memperkuat posisi mereka dalam jaringan politik atau memperoleh dukungan dalam kontestasi politik yang lebih besar di masa depan.

DB merupakan seorang pengusaha yang berperan sebagai salah satu tim sukses dalam pemenangan kandidat bakal calon Bupati pada Pilkada 2024 di tingkat kabupaten, menyatakan bahwa dirinya tidak mengharapkan imbalan uang atas partisipasinya. Alih-alih, ia berharap agar kandidat yang didukungnya saat ini akan memberikan dukungan balik ketika ia terlibat dalam kontestasi politik mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *broker* dan kandidat politik bersifat timbal balik dan tidak selalu bersifat transaksional dalam bentuk uang, melainkan lebih pada pertukaran dukungan politik yang bersifat strategis.

*Broker* dalam politik bukanlah individu sembarangan, melainkan sosok yang sudah memiliki posisi sosial yang mapan dan pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat (Stokes et al., 2013). Status sosial yang kuat serta jaringan yang luas memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan dan memobilisasi dukungan politik bagi kandidat yang mereka dukung. Dalam konteks Pilkades di Desa Pala Pulu, kehadiran *broker* dengan latar belakang yang kuat tidak hanya meningkatkan efektivitas strategi elektoral kandidat, tetapi juga memperkuat jejaring politik yang dapat digunakan dalam kontestasi politik yang lebih besar di masa mendatang.

*“Anggo ahu, malahan ahu do mangalean hepeng asa boe nian dipakke calon Kades on tu dana kampanye, ikkon bantuon do. Ale pangidoanku, haduan molo pemilihan Bupati, ibana pe boe menarik massa tu na ta dukung.” (Bahasa Batak, wawancara dengan DB)*

*“Kalau saya, malah saya itu memberikan uang sekiranya bisa dipakai oleh calon Kades untuk dana kampanye, harus dibantu. Tapi permintaan saya, kelak jika pemilihan Bupati, dia juga bisa menarik massa untuk yang kita dukung.” (wawancara dengan DB)*

Peran *broker* di Desa Pala Pulu dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak hanya sebatas sebagai perantara antara kandidat dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai agen perakit jaringan politik yang lebih luas. Konsep *broker as assembler* (Koster dan Leynseele,

2018), menggambarkan *broker* sebagai aktor yang secara aktif menyusun dan menghubungkan berbagai elemen dari lingkungan sosial dan politik untuk membentuk jaringan yang lebih besar dan terkoordinasi. *Broker* pada saat pemilihan kepala desa di Desa Pala Pulu tidak hanya bekerja untuk memenangkan kandidat dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga membangun fondasi politik untuk kontestasi yang lebih besar, seperti Pemilu Bupati pada tahun 2024. Proses ini melibatkan pembentukan *assemblage*—suatu jaringan yang mengintegrasikan berbagai elemen sosial, politik, dan institusional ke dalam struktur yang lebih produktif dan strategis.

Koster dan Leynseele (2018) menjelaskan bahwa proses ini mencakup beberapa tahap penting, yakni: 1) menjalin keberpihakan, yaitu menentukan pihak mana yang akan didukung dan membangun koalisi politik yang kuat; serta 2) menyatukan aktor, lembaga, dan sumber daya yang berbeda ke dalam suatu struktur yang bersifat sementara tetapi efektif dalam mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, *broker* bertindak sebagai titik awal analitis dalam memahami bagaimana praktik politik lokal dirakit dan dipasang kembali dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan supra-lokal serta pengaruh kekuatan global. Dengan demikian, strategi *broker* di Desa Pala Pulu tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam Pilkades, tetapi juga mencerminkan strategi elektoral yang lebih kompleks dalam membangun jaringan politik yang dapat berfungsi dalam skala yang lebih luas, seperti Pilkada Bupati 2024.

LM menyatakan bahwa pendanaan kampanyenya dalam Pilkades tidak sepenuhnya berasal dari sumber pribadi, melainkan juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, rekan sekampung, serta simpatisan yang memberikan kontribusi finansial. Dalam konteks politik lokal, dukungan finansial ini menjadi bagian dari strategi elektoral yang lebih luas, di mana aliansi dan jejaring sosial memainkan peran penting dalam membangun basis dukungan yang solid.

LM juga mengakui bahwa *broker* politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika pemilihan, terutama karena mereka sering kali tidak hanya bertindak sebagai mediator antara kandidat dan pemilih, tetapi juga sebagai penyokong dana dengan harapan memperoleh timbal balik di masa mendatang. Kesadaran akan persaingan dengan kandidat lain yang berasal dari marga yang sama membuat LM merasa perlu menggandeng *broker* yang memiliki reputasi baik dan dihormati dalam komunitas. Dalam hal ini, LM memahami

bahwa setiap *broker* memiliki motif tertentu, namun selama motif tersebut sejalan dengan visi dan kepentingannya, ia tidak melihatnya sebagai sebuah hambatan.

Lebih lanjut, LM menekankan bahwa meskipun peran *broker* tetap relevan dan diperlukan dalam kontestasi politik, keberadaan mereka harus dikelola secara hati-hati. *Broker* tetap menjadi bagian dari strategi elektoral, tetapi mereka tidak boleh tampil secara eksplisit atau mencolok dalam arena politik. Hal ini mencerminkan bagaimana dinamika politik lokal masih dipengaruhi oleh struktur informal dan jaringan patronase, yang beroperasi dalam ranah yang sering kali tidak terlihat secara langsung namun memiliki dampak yang besar terhadap hasil pemilihan.

*“Ba molo broker dang pola tanda dibaen, boru. Alana olo do haduan muba Rohana, dang iba be didukung. Ale ba molo marsibantuan haduan, na ikkon do I, je dang olo ahu mamaksa manang mangikkat jolma ikkon rap torus.”* (Bahasa Batak, Wawancara dengan LM)

*“Kalau broker tidak boleh terlalu kelihatan kita buat, boru (anak Perempuan). Karena suatu hari nanti hatinya berubah, bukan saya lagi yang didukungnya. Tetapi kalau untuk saling membantu suatu hari nanti, ya harusnya itu, jadi saya tidak mau memaksa atau mengikat orang agar selalu bersama saya.”* (Wawancara dengan LM)

Selain itu, LM juga memahami bahwa kontestasi politik dalam Pilkades tidak hanya berdampak pada tingkat desa, tetapi juga dapat merepresentasikan dinamika politik dalam lingkup yang lebih luas, seperti Pilkada di tingkat kabupaten atau daerah. Kepala desa yang terpilih sering kali memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik masyarakat, terutama dalam menentukan arah dukungan terhadap calon bupati tertentu. Sebagai figur pemimpin lokal, pilihan kepala desa dapat menjadi indikator atau bahkan acuan bagi masyarakat dalam menentukan preferensi politik mereka pada skala yang lebih besar.

Namun, LM juga menyadari bahwa dalam konteks regulasi politik, terdapat batasan yang jelas mengenai netralitas aparatur pemerintahan dalam pemilu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pegawai pemerintahan, termasuk kepala desa, dilarang secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi politik.

Oleh karena itu, strategi mobilisasi suara harus dilakukan dengan cara yang lebih subtil dan tidak mencolok agar tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pengaruh kepala desa terhadap preferensi politik masyarakat sering kali dilakukan melalui pendekatan informal, seperti diskusi komunitas atau jejaring sosial berbasis kekerabatan, tanpa secara eksplisit menunjukkan keberpihakan yang dapat melanggar regulasi pemilu.

*"Toho do nian molo monang Kades biasana ittor tarida do haduan ise calon Bupati na monang di huta I. Ale kan dang boe taridahonon niba I, boru. Ikkon malo-malo niba do, alana peraturan pe mandok dang boe tarida baenon tu ise iba mamillit. Annon ba paling dongan annon suruon asa diajak na asing, misalna molo Kades na dipillit na si A manang si B." (Bahasa Batak, Wawancara dengan LM)*

*"Memang betul jika Kades yang menang biasanya langsung terlihat tentang siapa calon Bupati yang akan menang di desa itu. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh terlihat, Nak. Harus pintar-pintar, karena peraturan juga mengatakan bahwa tidak boleh terlihat siapa yang dipilih oleh aparat desa. Nanti paling-paling juga teman yang disuruh agar bisa mengajak yang lain, misalnya Kades memilih si A atau si B." (Wawancara dengan LM).*

DB sebagai broker dalam kontestasi politik di Desa Pala Pulu berhasil membentuk simpul-simpul jaringan broker baru dengan tujuan strategis, yaitu memperkuat dukungan bagi calon kepala desa yang sejalan dengan kepentingannya. Lebih dari sekadar memenangkan Pilkades, langkah ini juga dimaksudkan untuk membangun basis dukungan politik yang lebih luas guna membantu calon Bupati yang didukungnya dalam Pilkada 2024. Strategi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Koster dan Leynseele (2018), yang menyatakan bahwa broker politik berperan sebagai *assemblers* (perakit/pengumpul) yang secara aktif menghubungkan berbagai aktor politik, sumber daya, dan kepentingan dalam satu jaringan yang terorganisir.

Keberhasilan politik sangat bergantung pada keberadaan kesepakatan antara aktor politik dan broker. Kesepakatan ini berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mendistribusikan sumber daya, membangun aliansi strategis, serta memobilisasi dukungan politik yang diperlukan untuk memenangkan

pemilihan di tingkat lokal. Broker politik memainkan peran sentral dalam mengelola patronase, memastikan bahwa sumber daya politik dapat diarahkan dengan efektif kepada kelompok-kelompok pemilih yang dianggap strategis (Aspinall, 2014; Berenschot, 2018). Dalam konteks Pilkades di Desa Pala Pulu, peran broker tidak hanya sebatas memenangkan kandidat kepala desa tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang untuk membangun dukungan elektoral dalam skala yang lebih luas.

#### **Hubungan dengan Pemilu Berikutnya.**

Pemilihan Kepala Desa di Desa Pala Pulu pada tahun 2023 ternyata memiliki keterkaitan erat dengan Pemilu yang dilaksanakan pada Februari 2024. Kontestasi politik tingkat desa ini tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik yang lebih luas dalam skala kabupaten dan provinsi. DB, seorang broker politik yang mendukung salah satu bakal calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten pada penghujung tahun 2024, telah merancang dan membangun jaringan broker baru sejak Pilkades 2023. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat basis dukungan politik bagi kandidat yang didukungnya, memastikan adanya simpul-simpul kekuatan politik yang dapat dioptimalkan dalam kontestasi yang lebih besar.

Keunikan dari strategi politik ini terletak pada langkah yang diambil oleh bakal calon Bupati tersebut, yang terlebih dahulu mengikuti kontestasi Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Utara sebelum bersaing dalam Pilkada Kabupaten. Menurut DB, pencalonan dalam Pemilu DPRD Provinsi ini dapat menjadi indikator awal atau *test case* dalam mengukur daya tarik elektoral kandidat di tingkat kabupaten. Jika kandidat tersebut mampu memperoleh suara yang signifikan di daerah pemilihannya (Dapil), maka peluangnya untuk memenangkan Pilkada Kabupaten akan semakin besar.

DB dalam upaya memperluas jaringannya, secara strategis menargetkan kalangan ibu rumah tangga sebagai elemen penting dalam mobilisasi suara. Menurutnya, ibu rumah tangga memiliki pengaruh besar dalam menentukan preferensi politik anggota keluarganya, termasuk suami dan anak-anak yang telah memiliki hak pilih. Hal ini terbukti dalam interaksi yang terjadi menjelang Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Utara, ketika beberapa ibu rumah tangga secara aktif mendatangi rumah DB dan menyatakan kesiapan mereka untuk membantu penggalangan suara.

Salah satu peristiwa yang menggambarkan dinamika patronase dalam politik lokal terjadi

pada malam sebelum pemilu Februari 2024. Seorang ibu rumah tangga berinisial BE mendatangi rumah DB untuk berdiskusi mengenai keterlibatannya dalam proses mobilisasi suara. Dalam pertemuan tersebut, BE secara terbuka mengungkapkan harapannya terhadap imbalan yang dapat diperolehnya sebagai bentuk kompensasi atas dukungannya. Kejadian ini mengilustrasikan bahwa meskipun strategi politik berbasis modal sosial dan jaringan kekerabatan memainkan peran penting, aspek pragmatis seperti ekspektasi timbal balik masih menjadi bagian dari praktik politik di tingkat lokal.

*“Anggo ahu dabah ito, na jelas-jelas do hugarap. Dang olo ahu margabus. Molo ulak ni 20 do na tolaphu ba I ma hupertanggung jawabhon. Dang na hupangido hepeng, ai hepeng na sinari do. Ale haduan molo porlu nian iba di akka parsuratan, boe ma nian hatop jala unang be adong akka pungli. Jala molo boe, husolothon haduan ianakhonku tu usaha ni amang I (calon DPRD Prov. Sumatera Utara sekaligus bakal calon bupati).”*

*“Kalau aku ya ito, jelas yang kukumpulkan. Aku tidak mau berdusta. Jikalau hanya 20 orang yang kumampu maka itu yang akan kupertanggungjawabkan. Aku tidak meminta uang namun di masa depan jika saya butuh dalam persuratan/administrasi ya kiranya dipermudah. Dan kalau bisa saya dapat memasukkan anak saya kerja di tempat usaha si bapak itu (calon DPRD Prov. Sumatera Utara sekaligus bakal calon bupati).*

DB menegaskan bahwa dalam menjalankan strategi politiknya, ia tidak menerapkan praktik *money politic* sebagaimana diarahkan oleh calon anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus bakal calon Bupati yang ia dukung. Pemilu DPRD 2024 dijadikan sebagai *benchmark* untuk menguji kesetiaan para pendukung tanpa adanya insentif finansial secara langsung. Strategi ini bertujuan untuk membangun basis pendukung yang lebih ideologis dan berbasis modal sosial, bukan sekadar transaksional.

Kepala Desa yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari DB tidak secara eksplisit menunjukkan keberpihakannya terhadap kandidat tertentu. Hal ini sejalan dengan regulasi yang melarang pegawai pemerintahan untuk terlibat dalam aktivitas

politik praktis. Namun, jaringan sosial dan kepercayaan yang telah dibangun oleh DB sejak Pemilihan Kepala Desa justru memberikan dampak yang signifikan dalam pemilu berikutnya. Keberhasilan strategi ini menunjukkan bahwa pengaruh broker politik tidak hanya terbatas pada tahapan kampanye, tetapi juga berlanjut dalam bentuk jejaring kepercayaan yang lebih luas dan berjangka panjang.

Hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada 15 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa calon DPRD Sumut yang didukung oleh DB berhasil masuk dalam daftar 100 nama dengan perolehan suara tertinggi (Aldi, 2024). Fakta ini memberikan harapan besar bagi DB dan tim suksesnya karena kandidat yang mereka dukung memperoleh suara signifikan di desa Pala Pulu serta di tingkat kabupaten, meskipun tanpa menggunakan strategi *money politic*.

Menariknya, selama proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa praktik *money politic* masih sangat umum terjadi di Desa Pala Pulu, tidak hanya dalam pemilihan DPRD tingkat kabupaten, tetapi juga hingga pemilihan anggota DPR pusat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan DB yang berbasis pada jaringan sosial dan kepercayaan telah menjadi alternatif yang efektif dalam membangun loyalitas politik.

Keberhasilan DB dalam memanfaatkan simpul broker untuk memperluas jaringan dukungan juga dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Aspinall (2014) mengenai peran broker dalam politik patronase. Dengan mengoptimalkan jaringan sosial, broker tidak hanya bertindak sebagai perantara suara, tetapi juga sebagai agen yang memperkuat struktur politik kliennya di berbagai tingkatan pemerintahan. Model politik ini menunjukkan bahwa fungsi broker dalam kontestasi elektoral dapat berkembang lebih jauh dari sekadar fasilitator transaksional, menjadi aktor strategis yang mampu membangun basis politik berbasis modal sosial dan kepercayaan jangka panjang.

Modal sosial tetap menjadi elemen kunci dalam meraup dukungan masyarakat dalam kontestasi politik di Desa Pala Pulu. Meskipun praktik *money politic* masih ada, pengaruhnya semakin berkurang karena meningkatnya tingkat kesadaran dan pendidikan politik warga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran strategi

elektoral, di mana kandidat dan tim suksesnya lebih mengandalkan jaringan sosial serta pendekatan berbasis kepercayaan dibandingkan dengan politik uang yang transaksional. Keberadaan broker dalam politik desa tetap relevan, terutama karena persaingan yang semakin ketat dan tidak lagi dapat bergantung pada faktor primordialisme semata.

Kandidat dalam Pilkades Desa Pala Pulu berasal dari suku dan marga yang sama, sehingga diferensiasi berbasis kesamaan etnis atau genealogis tidak lagi efektif sebagai strategi kemenangan. Dalam kondisi ini, peran broker menjadi lebih signifikan sebagai penghubung antara kandidat dan masyarakat. Broker tidak hanya sekadar perantara, tetapi juga bertindak sebagai *assembler* atau perakit jaringan politik (Koster & Leynseele, 2018).

Sebagai *assembler*, broker tidak hanya membantu kandidat kepala desa dalam memenangkan pemilihan, tetapi juga membangun strategi politik jangka panjang yang berorientasi pada pemilu mendatang, seperti Pemilu Bupati 2024. Dengan status sosial dan ekonomi yang baik serta dihormati oleh masyarakat, broker memiliki daya tarik dan legitimasi yang lebih kuat dalam memobilisasi dukungan. Selain itu, broker dalam konteks ini tidak hanya bermotif ekonomi, tetapi juga memiliki kepentingan strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat posisi politiknya di masa depan.

Strategi perakit jaringan broker yang dilakukan pada Pemilu 2024 mencerminkan dinamika baru dalam politik patronase di tingkat lokal. Selain kepala desa, broker juga merekrut simpul-simpul baru dari kalangan ibu rumah tangga. Berbeda dari asumsi umum bahwa dukungan politik selalu bersifat transaksional dalam bentuk uang, para ibu rumah tangga ini tidak menuntut materi secara langsung. Sebaliknya, mereka mengharapkan bentuk kompensasi sosial di masa depan, seperti kemudahan dalam pengurusan administrasi dan akses pekerjaan bagi anak-anak mereka dalam sektor usaha yang dimiliki oleh patron politik (bakal calon Bupati sekaligus calon DPRD Sumatera Utara).

## KESIMPULAN

Pada dinamika politik di Desa Pala Pulu, modal sosial tetap menjadi kunci utama dalam meraih dukungan warga. Praktik politik uang memang masih ada, tetapi pengaruhnya mulai berkurang seiring

meningkatnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Hal ini menandai pergeseran strategi kampanye, di mana kandidat lebih mengandalkan jaringan sosial dan hubungan kepercayaan ketimbang pendekatan transaksional. Meski begitu, peran broker politik tetap penting. Karena kandidat yang bersaing berasal dari suku dan marga yang sama, pendekatan berbasis kesamaan etnis tak lagi efektif. Di sinilah broker hadir sebagai perakit jaringan politik—mereka bukan sekadar penghubung, tapi juga penyusun strategi yang memikirkan arah politik jangka panjang, termasuk menuju Pemilu Bupati 2024. Broker dengan status sosial dan ekonomi yang kuat memiliki legitimasi lebih besar dalam menggerakkan dukungan. Motivasinya pun tidak semata-mata ekonomi, tetapi juga demi memperluas pengaruh politik. Dalam membangun jaringan, mereka kini melibatkan aktor baru, termasuk ibu rumah tangga, yang mendukung bukan karena uang, melainkan harapan akan akses kemudahan administrasi atau pekerjaan untuk anak-anak mereka di masa depan. Dengan demikian, peran broker dalam politik desa tidak hanya terbatas sebagai distributor dan mobilisator suara, tetapi juga sebagai arsitek strategi politik jangka panjang. Mereka merakit jaringan broker baru yang berpotensi memperkuat patronase politik dalam kontestasi yang lebih besar. Model politik ini menunjukkan bahwa politik lokal di desa tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga melibatkan kalkulasi strategis untuk mempertahankan pengaruh dalam struktur kekuasaan yang lebih luas.

## REKOMENDASI

1. Perlunya penelitian lanjutan terutama untuk memperjelas temuan terkait simpul broker di pemilihan bupati pada penghujung tahun 2024
2. Pemangku kebijakan harus membuat peraturan dengan sanksi yang jelas terkait perputaran uang akibat maraknya *money politic* selama pemilu berlangsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku Lembaga dimana penulis bekerja, dan LPDP yang telah memberikan bantuan dana pendidikan, serta kepada pihak-pihak yang

memberi bantuan, dukungan, dan masukan dalam proses penulisan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aldi, Nizar. 2024. Daftar 100 Anggota DPRD Sumut Terpilih Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi. [Online] Dari: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7242610/daftar-100-anggota-dprd-sumut-terpilih-hasil-rekapitulasi-kpu-provinsi> [Diakses 16 Maret 2024].

Amaranggana, LP. Nugroho, R.S . 2024. UU Desa: Jabatan Kades Bisa 16 Tahun, Dapat Tunjangan Anak Dan Pensiun. [Online] Dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/09/093000265/uu-desa--jabatan-kades-bisa-16-tahun-dapat-tunjangan-anak-dan-pensiun> [Diakses 16 Maret 2024].

Arber, A. 2006. Reflexivity: A Challenge for the Researcher as Practitioner?. *Journal of Research in Nursing* 11(2):147-57. doi: 10.1177/1744987106056956.

Aspinall, E. 2014. When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies* 46(4):545-70. doi: 10.1080/14672715.2014.960706.

Badan Pusat Statistik. 2023. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Dan Daerah Tempat Tinggal, 2021-2022. *Sumut.Bps.Go.Id*.

Berenschot, W. 2018. The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies* 51(12):1563-93. doi: 10.1177/0010414018758756.

Bertero, A. Gaetano, S. 2023. A Midsummer Night's Dream: Political Communication during the Italian 2022 Electoral Campaign. *Quaderni Dell'Osservatorio Elettorale* 86(1):13-28. doi: 10.36253/qoe-14224.

Bierschenk, T. Jean-pierre, C. Jean-Pierre, Olivier de Sardan. 2002. Local Development Brokers in Africa. The Rise of a New Social Category. *Arbeitspapiere/ Working Papers. Institut Für Ethnologie Und Afrikastudien / Department of Anthropology and African Studies. Johannes Gutenberg Univ. Mainz. Working Papers* (13):44.

Bräuchler, B. 2019. Brokerage, Creativity and Space: Protest Culture in Indonesia. *Journal of Intercultural Studies* 40(4):451-68. doi: 10.1080/07256868.2019.1628721.

Damanik, EL. 2018. *Politik Lokal Dan Dinamika Etnisitas Pada Era Desentralisasi Di Sumatera Utara*. Medan: Simetri Institue.

Hammersley, M. Martyn H. 1992. *WHAT ' S WRONG WITH ETHNOGRAPHY?* Canada: Routledge.

Hammersley, M. Traianou, A. 2012. *Ethics in Qualitative Research*. London: SAGE Publications.

Holmes, AGD. 2020. Researcher Positionality: A Consideration of Its Influence and Place in Qualitative Research. *Shanlax International Journal of Education* 8(4):1-10.

Koster, M. Leynseele, YV. 2018. Brokers as Assemblers: Studying Development Through the Lens of Brokerage. *Ethnos* 83(5):803-13. doi: 10.1080/00141844.2017.1362451.

Lindquist, J. 2015. Brokers and Brokerage, Anthropology Of." *International Encyclopedia of Social and Behavioral Science, 2nd edition*. Amsterdam: Elsevier.

Michie, M. 2014. *Identity Learning, Border Crossing and Culture Brokering*. Vol. 53.

Miles, MB. Huberman, AM. Saldana, J. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Forth Edit. USA: SAGE Publications.

Panjaitan, NL. Sardini, NH. 2019. Pengaruh Nilai Adat Batak Dalihan Na Tolu Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Di Kecamatan Tarutung Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies* 8(02):61-70.

Pinem, Windawati. 2023. SEGMENTASI KLAN (MARGA) DALAM PILKADES DESA POHAN JAE TAHUN 2015. *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(1):16-25.

Putnam, R. D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American of Prospect* 13 35-42.

Rosha, MA., Adeline, PM. Damanik, PY. Ivana, J. 2023. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat. *Mediation: Journal Of Law Volume* 2(1).

Situmorang, JT. 2022. *Mitologi Batak*. 1st ed. edited by Maya. Yogyakarta: Cahaya Harapan.

Stokes, SC. Dunning, T. Nazareno, M. Busco, V. 2013. *Brokers, Voters, And Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.

Surya, DA. Noerzaman, A. Usni, U. 2021. "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades." *INDEPENDEN Jurnal Politik Dan Global* 2(2).

Yaghi, A. Antwi-Boateng, O. 2017. Public Policy Issues and Campaign Strategies: Examining Rationality and the Role of Social Media in a Legislative Election Within a Middle Eastern Context. *Digest of Middle East Studies* 26(2):398-421. doi: 10.1111/dome.12118.